

Judul : Pemusnahan KTP-EL Baru Sebagian
Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Pemusnahan KTP-EL Baru Sebagian

● DIAN ERIKA NUGRAHENY,
RIZKY JARAMAYA

Pemusnahan total baru dilaksanakan tahun depan.

BOGOR — Proses pemusnahan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) invalid (rusak) terus berlangsung. Pemusnahan dilakukan di gudang aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sampai Rabu (30/5), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencatat 56 kardus berisi total 156.800 KTP-el dimusnahkan dengan cara digunting pada bagian ujung.

Jumlah itu jauh di bawah total KTP-el invalid yang diketahui selepas inspeksi mendadak Komisi II DPR di gudang tersebut, Senin (28/5), yaitu 805 ribu KTP-el. Ditjen Dukcapil Kemendagri menargetkan pemusnahan tuntas dalam dua hari ke depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjono menjelaskan, penggantian KTP-el invalid dilakukan untuk menepis kekhawatiran masyarakat. Sebab, selepas insiden KTP-el

tercecer di simpang Salabenda, Sabtu (26/5), sebagian publik khawatir KTP-el invalid disalahgunakan. "Karena yang tercecer kemarin bentuknya bagus kan jadi masalah. Coba kalau itu sudah terpotong, kan tidak akan menimbulkan masalah," ujar Tjahjono.

Ia kembali menjelaskan alasan Kemendagri baru memusnahkan KTP-el invalid dengan cara digunting pada bagian ujung. Menurut dia, KTP-el yang ada di gudang merupakan hasil pengadaan sejak 2010. Sementara, kasus KTP-el yang melibatkan mantan ketua umum Partai Golongan Karya sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto merupakan paket pengadaan 2011-2012.

Pada 2011, pencetakan KTP-el mulai dilakukan untuk kemudian didistribusikan ke daerah masing-masing. KTP-el invalid itu kemudian disimpan di gudang aset BPSDM Kemendagri di Kabupaten Bogor.

"Kan ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum selesai memeriksa, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga bisa setiap tahun mengecek. Itu saja intinya. Tidak bisa dimusnahkan begitu saja," kata Tjahjono.

Lebih lanjut, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengakui kesalahan institusi Kemendagri atas insiden KTP-el ter-

cecer. Hal itu menjadi bahan evaluasi bagi Kemendagri. "Saya khilaf. Itu benar terjadi," ujar Tjahjono.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pemusnahan total KTP-el invalid baru akan dilakukan pada tahun depan. Hal itu menunggu tuntasnya perhelatan politik pemilihan kepala daerah serentak 2018 hingga pemilihan presiden 2019.

"Kalau ada yang menanyakan mana KTP yang dulu, kita masih bisa tunjukkan, tapi sudah disfungsi atau tidak bisa digunakan untuk pilkada, pileg, dan pilpres pilkada karena sudah dipotong, sehingga tidak ada keraguan, mau dicuri, mau diambil," kata Zudan.

Untuk menghindari insiden serupa terulang, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menyiapkan prosedur operasi (SOP) baru, yaitu setiap KTP-el invalid yang ingin dikirim ke Jakarta harus digunting terlebih dahulu. "Fisiknya dibawa ke sini (gudang aset BPSDM Kemendagri di Kabupaten Bogor—Red) untuk dimintakan ganti," ujarnya.

Pada Sabtu (26/5), sebuah video viral menunjukkan ratusan KTP-el tercecer di simpang Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga tampak sedang melihat-lihat KTP-el yang beralamatkan kabu-

paten/kota di Sumatra Selatan.

Mendagri menduga ada sabotase. Di ranah publik berkembang dugaan KTP-el invalid disalahgunakan demi kepentingan politik, apalagi pilkada serentak 2018 akan berlangsung dalam hitungan hari, tepatnya pada 27 Juni 2018. Dugaan tersebut terutama disampaikan sejumlah wakil rakyat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyalahgunaan KTP-el dalam pilkada kecil kemungkinan terjadi. Meski demikian, KPU meminta pemerintah menuntaskan insiden KTP-el tercecer sehingga tidak memperbesar kecurigaan publik.

Pramono menjelaskan, jika seseorang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan suara menggunakan KTP-el, itu hanya boleh dilakukan pada satu jam terakhir. Meski diperbolehkan menggunakan KTP-el, kesesuaian data pemilih tetap akan dicek. "Sehingga tidak mungkin yang memegang punya KTP-el perempuan, lalu saat di TPS yang membawa laki-laki," kata Pramono.

Dia pun mengingatkan, petugas TPS rata-rata mengenal pemilih. Sebab, petugas TPS diambil dari tokoh yang dikenal masyarakat setempat. "Jadi, peluang penyalahgunaan KTP-el ini kecil sekali," ujar Pramono.

■ zahrotul oktaviany ed: muhammad iqbal



Wawancara
Menteri Dalam
Negeri Tjahjono
Kumolo

Hlm-9